



Kisruh APBD DKI Dugaan Anggaran Siliman Menguat

JAKARTA, KOMPAS — Dugaan adanya anggaran siliman dalam APBD DKI Jakarta tahun 2014 dan Rancangan APBD tahun 2015 menguat. Perusahaan pemenang lelang tak cukup meyakinkan, sementara instansi pengguna menyatakan tak pernah mengajukan usulan anggaran.

Kantor CV Bintang Mulia Wisesa, perusahaan pemenang tender pengadaan alat pasokan daya listrik bebas gangguan (*uninterruptible power supply/UPS*) senilai Rp 5,8 miliar untuk SMA Negeri 27 Jakarta pada 2014, misalnya, ternyata adalah tempat perbaikan alat penyejuk ruangan (AC). "Saya tidak tahu-menahu soal pengadaan UPS karena saya *ngurusin* bengkel saja. Kalau soal UPS yang *megang* anak saya," ujar Zainuri (60), ayah dari Indah Lestari, pemilik CV Bintang Mulia Wisesa, yang beralamat di Kebon Bawang, Jakarta Utara, Minggu (1/3):

Zainuri menambahkan, anak ketiganya itu memiliki kantor lain di Jakarta Pusat. Dia mengaku tak tahu soal pengadaan UPS yang dikerjakan putrinya.

Sejumlah instansi yang tercatat sebagai pengguna anggaran dalam Rancangan APBD 2015 versi DPRD DKI Jakarta juga tak tahu-menahu soal usulan pengadaan UPS senilai Rp 4,2 miliar itu. Dalam draf APBD 2015, tercatat 64 kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat mendapat jatah anggaran pengadaan UPS.

Sejumlah camat bahkan terkejut dan baru saja mengetahuinya. Camat Tambora, Jakarta Barat, Mursidin, mengatakan, pihaknya tidak pernah mengusulkan pengadaan alat yang berfungsi sebagai catu daya alternatif itu. Apalagi, di kantor Kecamatan Tambora hanya ada empat unit komputer. Pengadaan UPS dengan anggaran sebesar itu dianggap kurang bermanfaat.

"Kami tidak pernah tanda tangani usulan pengadaan UPS. Usulan itu pun tidak muncul di musyawarah rencana pembangunan kecamatan," katanya.

Dana senilai Rp 4,2 miliar, menurut Mursidin, lebih baik digunakan untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti penanganan genangan dan banjir, normalisasi saluran air, serta penambalan jalan rusak.

Hal senada diungkapkan Camat Cengkareng, Jakarta Barat, Ali Maulana Hakim. Menurut Ali, tidak pernah ada usulan UPS melalui forum musrenbang ataupun inisiatif dari kecamatan. Pengadaan UPS pun tidak termasuk program prioritas karena hanya ada sekitar 10 komputer di kantor kecamatan. Bahkan, pegawai pun lebih banyak menggunakan laptop yang masih bisa



Mereka Bersatu dalam Semangat Anti Korupsi

HAL 25

Menurut Wakil Camat Penjaringan Abdul Khalit, pihaknya tidak pernah mengusulkan alat itu. Khalit bahkan tidak mengerti seperti apa alat yang dimaksud, bagaimana bentuknya dan kegunaannya.

Rp 12,1 triliun

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, secara total ada Rp 12,1 triliun anggaran yang tiba-tiba muncul dalam RABPD 2015. Dia menduga ada oknum yang memasukkannya sebelum draf disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Fahmi Zulfikar menyatakan, terkait pengadaan UPS pada 2014, sebaiknya ditanyakan kepada pengguna. "Tanya saja mereka butuh atau tidak. Soal harganya, silakan cek di pasaran, apa wajar atau tidak," ujarnya.

Menurut Fahmi, bisa jadi anggaran diusulkan DPRD, tetapi DPRD bukan pengguna. "Jika dianggap tak perlu, dinas atau suku dinas tidak perlu mengadakannya. Tidak perlu lelang juga," ujarnya. (MKN/DEA/JAL)

dipakai saat listrik padam.

"Memang itu cukup penting, tetapi bukan prioritas karena di tempat kami jarang mati listrik," ujar Ali.

Khusus untuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menurut Ali, pelayanan masih bisa dioptimalkan dengan laptop. Karena menggunakan daya baterai, data di laptop cenderung lebih mudah diamankan saat listrik padam. Dana Rp 4,2 miliar lebih baik untuk penanganan banjir mengingat wilayah Cengkareng termasuk rawan banjir.

Ada juga sejumlah mata anggaran lain yang dinilai tak perlu. Sejumlah kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Utara, misalnya, mendapat alokasi dana untuk pengadaan audio-visual masing-masing Rp 810 juta. Kecamatan Penjaringan salah satunya.